

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Sistem Informasi Desa

##### 3.1 Infrastruktur Pendukung Telekomunikasi

###### 3.1.1 Kelengkapan Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam suatu pemerintahan, memiliki alat-alat telekomunikasi secara lengkap memang menjadi modal tersendiri untuk mengembangkan sistem informasinya. Di pemerintahan desa pun sama halnya, apabila alat-alat telekomunikasinya lengkap maka akan mudah bagi desa itu untuk mengembangkan sistem informasinya yang mana dapat diwujudkan dengan adanya website. Alat-alat telekomunikasi yang harus dimiliki setiap institusi apabila ingin mengembangkan sistem informasinya yaitu, hardware, software, storage, dan jaringan. Di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri sudah memiliki beberapa alat-alat telekomunikasi (*hardware*) yang mana dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasinya. Berikut ini adalah alat-alat telekomunikasi yang dimiliki Kantor Desa Sendang, yaitu:

**Tabel 20**  
**Perangkat Hardware di Kantor Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri**

No.	Nama Perangkat	Jumlah
1.	Monitor	2
2.	CPU	2
3.	Printer	2
4.	Keyboard	2
5.	Laptop	2
6.	Telephone	1

\*Sumber: Kantor Desa Sendang

Dilihat pada tabel diatas, perangkat keras yang dimiliki Kantor Desa Sendang sudah cukup lengkap apabila akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi desanya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Sebenarnya kalau komputer dan yang lain itu sudah ada, kami punya 2 komputer dan laptop. Memang saya merasa apabila digunakan untuk mengelola website dari segi ini sudah bisa, namun memang masih perlu melengkapi alat-alat yang lain.”

Perangkat keras (*hardware*) untuk kebutuhan pengelolaan website ini memang harus lengkap agar dapat berjalan dengan semestinya, namun tidak hanya hanya hardware saja. Salah satu yang terpenting dalam pengimplementasian sistem informasi desa ini adalah software, untuk software itu sendiri ada berbagai jenis, diantaranya xampp, filezilla, photoshop/corel draw, dreamweaver, putty, firefox web developer, pagespeed insight dan responsive design.

Ada begitu banyak *software* yang harus dimiliki dan juga dapat dioperasionalkan secara baik, namun untuk di Desa Sendang ini sendiri belum dapat mengoperasionalkan perangkat-perangkat tersebut. ini dibuktikan dengan adanya dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Untuk nama-nama itu saya belum paham, pernah dengar photoshop dan coreldraw tapi saya tidak bisa menggunakannya. Saya lihatnya diwalpaper komputer dan laptop. Saya kira aparatur disini semua belum ada yang bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut ya, mbak.”

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Agustus 2017.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 14 Agustus 2017.

Selain hardware dan software tentu saja harus ada storage atau media penyimpanan yang memerlukan jaringan internet yang mana file-filenya berada di komputer, penyedia layanan ini menggunakan ratusan server untuk menyimpan file. Namun lagi-lagi para aparatur Desa Sendang ini belum memahami apa itu dan apa fungsi dari storage.

Dari ketiga hal tersebut yang sangat penting adalah adanya jaringan. Apabila dalam perangkat tersebut tidak ada jaringan, maka sistem informasi yang ada tidak akan dapat digunakan/diakses secara online. Proses pembuatan website memang tidak perlu menggunakan jaringan internet, namun untuk mengaksesnya harus dibutuhkan jaringan internet. Di Kantor Desa Sendang sudah cukup baik terkait dengan jaringan internetnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Jaringan internet di Kantor Desa Sendang ini sudah bagus. Karena kita sudah memiliki wifi sehingga mudah untuk mengakses internet.”

Dengan pernyataan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para aparatur Desa Sendang memang belum memahami terkait dengan pembuatan dan pengelolaan sistem informasi desa. Hal inilah yang harus menjadi tanggungjawab para Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan *skill* terkait dengan IT para aparatur desanya untuk dapat mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi desanya.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Agustus 2017.

### **3.1.2 Pengadaan dan Perawatan Alat-Alat Telekomunikasi**

Program implementasi sistem informasi desa selalu memerlukan alat-alat telekomunikasi untuk menunjang pelayanannya, tidak hanya itu saja setiap desa wajib untuk mengadakan barang seperti komputer/laptop, wifi, printer, dan yang lainnya yang dapat membantu berjalannya sistem informasi tersebut. Tidak hanya sampai pada pengadaan saja, namun setelah alat-alat tersebut sudah tersedia, maka pemerintah desa juga harus melakukan perawatan berkala untuk alat-alat tersebut agar tetap terawat dan dapat difungsikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan dan tata cara pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah diatur dalam Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 kemudian diubah menjadi Perka LKPP nomor 22 tahun 2015 dimana sebenarnya Perka ini diterbitkan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan barang dan jasa. Perka tersebut mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diatur oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Perka LKPP tersebut.

Pengadaan barang dan jasa pada umumnya memang memerlukan ULP/Pejabat pengadaan dan setiap desa wajib untuk membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan melalui surat keputusan dari Kepala Desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Nantinya TPK inilah yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, yang meliputi banyak kegiatan, seperti

persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sama halnya dengan Desa Sendang, dalam melakukan pengadaan barang dan jasanya desa tersebut melibatkan TPK untuk sarana prasarana dalam pengadaannya. Hal ini disampaikan pula oleh Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Pengadaan barang melalui TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Nanti melalui kasi dulu, kasi pembangunan talud nanti kasi itu yang membuat RAP, diajukan ke sekretaris desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa, kemudian dicairkan diambilkan dananya, kemudian nanti yang membelanjakan TPK.”

Dari pernyataan tersebut, bahwa benar adanya bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Desa Sendang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang pada Perka LKPP nomor 22 tahun 2015. Kepala Desa pun memberi pernyataan yang berbeda, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Kami anggarkan melalui dana, jadi desa itu mendapatkan 2 atau 3 sumber dana, pertama dari dana alokasi desa (ADD) itu kami peroleh dari Pemkab. Dana yang dari provinsi itu dapat digunakan untuk pembangunan gedung, bangunan desa, rehap kk miskin, kemudian dana yang dari pusat yang kami terima beberapa item kegiatan diantaranya 10 item kegiatan, yang tidak boleh digunakan hanya untuk membangun gapura desa. Jadi dana tersebut tidak boleh untuk membangun gapura desa. Jadi untuk pembangunan kantor TK boleh, pemberdayaan, infrastruktur, permodalan, pembuatan modal usaha kelompok dan lembaga boleh. Kemudian kami menganggarkan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat.”

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

Pada tahun 2016, Kantor Desa Sendang sudah banyak mengadakan barang dan jasa untuk melengkapi fasilitas kantor maupun melakukan pengadaan untuk pembangunan infrastruktur desa yang mana anggaran pengadaannya berasal dari 2 sumber, yaitu dari ADD dan dana APBDes. Pengadaan tersebut diantaranya, yaitu:

**Tabel 21**  
**Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Sendang,**  
**Kecamatan Wonogiri Tahun 2016**

No.	Barang dan Jasa	Harga
1.	Printer Canon	Rp. 780.000,00
2.	Printer Epson	Rp. 1.499.000,00
3.	Televisi	Rp. 1.358.000,00
4.	Rak Dokumen	Rp. 1.200.000,00
5.	Meja Front Office	Rp. 1.700.000,00
6.	Meja Kerja Kepala Desa	Rp. 3.900.000,00
7.	Komputer	Rp. 4.500.000,00
8.	Bahan Pembuatan Talud 12 Dusun	Rp. 220.000.000,00
9.	Bahan Pembuatan Rabat 12 Dusun	Rp. 326.000.000,00
10.	Pembuatan Jamban RTM	Rp. 25.100.000,00
11.	Pengembangan Perpustakaan Desa	Rp. 15.000.000,00
12.	Pembentukan BUMDes	Rp. 3.000.000,00
13.	Pelatihan Tata Rias PKK	Rp. 6.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 610.037.000,00</b>

\*Sumber: Kantor Desa Sendang

Terlepas dari semua hal tersebut, pada zaman yang serba teknologi seperti ini rasanya tidak menutup kemungkinan setiap organisasi/lembaga tidak menggunakan teknologi tersebut untuk dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan membagi berbagai informasi terkini seputar dengan apa yang menjadi bidang dari organisasi/lembaga tersebut. Demi menunjang berjalannya teknologi tersebut, adapun alat-alat untuk menunjang atau alat sebagai wadah dari kecanggihan teknologi tersebut.

Tanpa alat-alat penunjang tersebut teknologi hanyalah menjadi teknologi saja yang tidak bisa digunakan secara *real*. Konteks teknologi yang digunakan dalam hal sistem informasi adalah website. Suatu organisasi/lembaga pada zaman yang serba teknologi ini biasanya menggunakan website untuk alat komunikasi, alat penyebaran suatu informasi terkini hingga sebagai alat untuk melakukan pelayanan publik.

Teknologi tidak hanya digunakan di kota-kota besar saja, namun teknologi kini sudah menyebar luas di setiap daerah di Indonesia, termasuk di Kantor Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri. Untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan publiknya, desa tersebut juga sudah memiliki beberapa alat telekomunikasi yang dapat digunakan dengan baik untuk berinteraksi dengan masyarakatnya secara tidak langsung. Sekarang ini alat-alat telekomunikasi yang dimiliki oleh Desa Sendang dirasa sudah cukup walaupun masih jauh dari kata lengkap. Hal ini sama seperti apa yang sudah di nyatidakan oleh Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Sarana wifi untuk menunjang mengakses internet, untuk IT kami sudah memiliki komputer dan untuk komunikasi surat menyurat dengan Kabupaten maupun Provinsi kami sudah memiliki email.”

Seperti halnya pernyataan diatas, penulis juga melakukan observasi pada Kantor Desa Sendang dan benar adanya bahwa di kantor tersebut sudah memiliki wifi, komputer dan layanan email. Tidak itu saja, Kantor Desa Sendang juga memiliki printer, telephone dan televisi. Dirasa pada

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

zaman serba teknologi ini siapa yang tidak mengetahui kegunaan email, disisi lebih cepat dalam mengirimkan pesan, email juga memuat banyak berita dan *tools*, walaupun sistem ini hanya dapat digunakan 2 arah bersifat pribadi.

Pemanfaatan teknologi informasi ini telah diatur dalam UU Desa. Memiliki sebuah email sangat diperlukan karena dapat menjadi awal penerapan sistem elektronik dalam sisi pelayanan publiknya. Desa Sendang sudah memiliki email sejak tahun 2010, namun setelah penulis mencoba untuk mengirim pesan melalui email tersebut respon dari admin Kantor Desa sangat lamban, kurun waktu sekitar satu minggu email tersebut baru mendapat respon. Ini artinya email desa tersebut memang aktif namun bukan prioritas dalam melakukan pelayanan publiknya, email tersebut hanya digunakan sebagai sebuah wadah untuk memberi masukan dan melaporkan keluhan terhadap pelayanan publik yang di lakukan Kantor Desa Sendang.

Di samping mengadakan barang berupa alat-alat telekomunikasi, perlu dilakukan pula perawatan alat-alat tersebut agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan dalam waktu yang lama. Perawatan ini dimaksudkan agar alat-alat telekomunikasi yang ada di Kantor Desa Sendang ini dapat dioperasionalkan secara maksimal dalam menunjang proses pelayanan publiknya, sehingga tidak akan menimbulkan suatu kendala apapun seperti komputer nge-*blank* karena terkena virus, printer macet, dsb; sehingga dilakukan perawatan berkala terhadap alat-alat telekomunikasi tersebut.



Semua alat-alat penunjang yang ada di Kantor Desa Sendang ini juga dilakukan perawatan dan *service* berkala agar alat-alat tersebut tidak mudah rusak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Sutanto, sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Jika anggarannya sudah turun, ya dianggarkan pada awal bulan, *service* berapa kali, ganti *spare parts* berapa kali nanti ada rinciannya. Kalau dana sudah turun ya dilaksanakan. Jadi semisal di tahun 2017 tidak jadi beli atau *service*, maka dana tersebut akan disimpan untuk tahun yang akan datang, begitu seterusnya.”

Selama tahun 2016 selain melakukan pengadaan barang dan jasa, Desa Sendang juga melakukan beberapa perawatan terhadap alat-alat yang menunjang terkait dengan telekomunikasinya, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 22**  
**Perawatan Alat-Alat Telekomunikasi**  
**Kantor Desa Sendang Tahun 2016**

No.	Nama Alat	Tanggal Perawatan
1.	Telephone Kantor	15 Januari 2016
2.	Printer	8 Maret 2016
3.	Wifi	8 Agustus 2016
4.	Monitor Komputer	5 September 2016
5.	CPU	3 Oktober 2016

\*Sumber: Kantor Desa Sendang

### 3.1.3 Kemudahan Akses Masyarakat

Teknologi yang semakin canggih menuntut banyak lapisan masyarakat menggunakan teknologi tersebut. Tidak terkecuali aplikasi-aplikasi yang terdapat pada sistem sistem teknologi tersebut, namun dalam konteks ini diwujudkan dalam bentuk situs website. Ada berbagai macam

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.

aplikasi-aplikasi namun yang menjadi sorotan media massa sekarang adalah portal sebuah website.

Suatu portal website memiliki banyak informasi-informasi terkini, tidak hanya itu saja sebuah situs juga dapat memberikan informasi-informasi lampau atau berita lama. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap lapisan masyarakat karena dapat mempermudah kehidupan mereka. Semua aspek di kehidupan sekarang tidak lepas dari sebuah informasi guna mengembangkan jaringannya, entah itu dari sisi perdagangan, persewaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

Informasi-informasi itupun sudah bebas diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Terlepas dari kebebasan memperoleh informasi adapula kebebasan dan kemudahan akses informasi tersebut. Pada aspek pemerintah, mendapatkan informasi dan mendapatkan kemudahan akses merupakan hak seluruh warga negara karena dengan adanya kemudahan-kemudahan inilah yang nantinya akan menciptakan sebuah masyarakat yang demokratis sebagai bentuk dukungan kepada para aparatur negara dan kontrol masyarakat terhadap kinerja dalam melakukan pelayanan publiknya.

Kabupaten Wonogiri dan Kecamatan Wonogiri memang sudah memiliki website, namun website ini belum menjadi fokus pemerintah untuk dijadikan wadah sebagai sarana pelayanan publiknya berbasis elektronik. Ini dapat dilihat dengan sekilas pada layanan tampilan website

Kabupaten Wonogiri dan website Kecamatan Wonogiri, yaitu sebagai berikut:

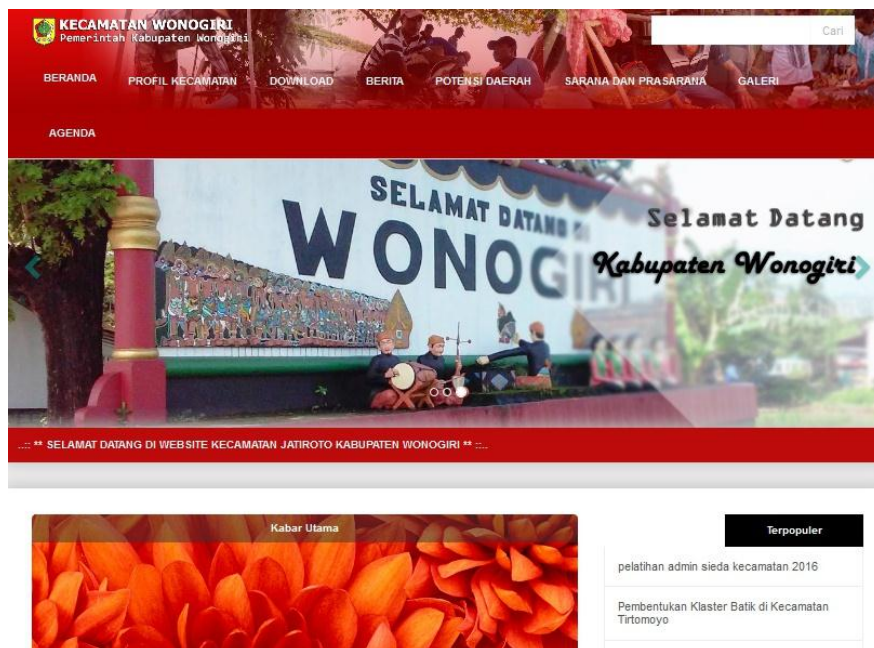
Gambar 2

Print Screen Beranda Website Kabupaten Wonogiri



Gambar 3

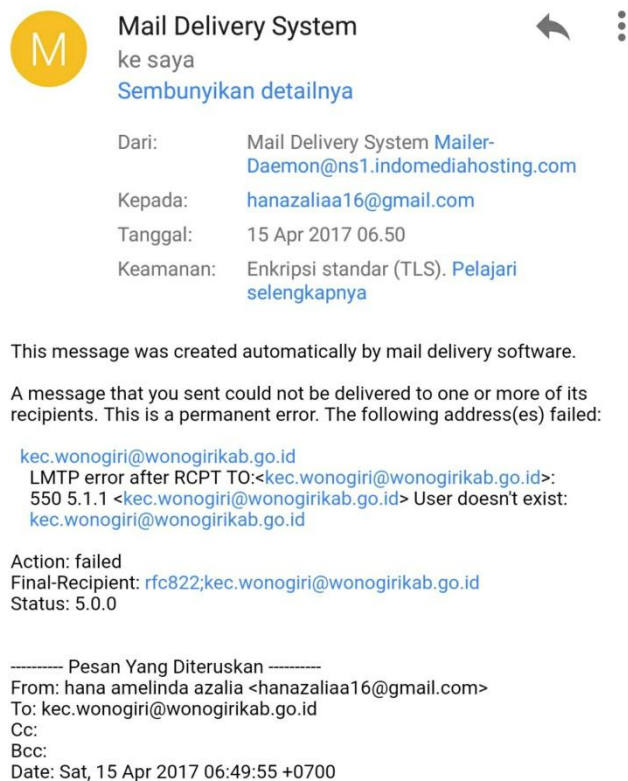
Print Screen Beranda Website Kecamatan Wonogiri



Gambar-gambar diatas merupakan *printscreen* dari beranda website yang dapat diakses di laman [www.wonogirikab.go.id/](http://www.wonogirikab.go.id/) untuk website Kabupaten Wonogiri dan laman [www.kec.wonogiri.wonogirikab.go.id/](http://www.kec.wonogiri.wonogirikab.go.id/) untuk website Kecamatan Wonogiri. Adanya website ini memang seharusnya dapat memberikan kemudahan akses informasi, namun informasi-informasi yang ada di dalam website tersebut tidak *up to date* bahkan email Kecamatan Wonogiri pun tidak aktif. Ketika penulis mencoba mengirimkan email ke Kecamatan Wonogiri, google membalas email penulis dan menyatidakan bahwa email tersebut tidak ditemukan, berikut *printscreen* balasan email tersebut:

#### Gambar 4

##### *Print Screen Notification Email*



Seperti yang tertulis diatas bahwa “*user doesn't exist*”, padahal email tersebut tercantum di website resmi Kabupaten Wonogiri pada kolom menu Pemerintahan → Kecamatan di website Kabupaten Wonogiri. Hal-hal semacam ini yang membuktikan bahwa memang sebenarnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terkini sedikit lebih sulit karena email di tingkat kecamatan pun tidak tercantum di akun google. Pada tingkat desa di Kecamatan Wonogiri, kemudahan aksesnya masih dilakukan secara manual dengan cara masyarakat mendatangi Kantor Desa Sendang secara langsung. Kantor Desa Sendang menggunakan sistem gotong royong untuk melakukan pelayanannya untuk kemudahan masyarakat. Hal ini disampaikan pula oleh Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Kami sistem pelayanannya Gayeng Bersambet, bahkan kami perangkat desa ini mampu/mempunyai keinginan memberikan pelayanan selama 24 jam. Jadi, baik dari pelayanan, hubungan ke masyarakat sosial, apapun masalah yang timbul tidak mengenal waktu, kami harus bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat.”

Gayeng Bersambet dapat dimaknai dengan bergotong royong seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, sehingga walaupun pelayanan di Kantor Desa sudah tutup, masyarakat yang sekiranya memiliki urusan yang sangat penting dan mendesak dapat langsung menghubungi para aparaturnya secara personal/pribadi. Ini merupakan salah satu inovasi yang sangat memiliki dampak positif terhadap masyarakatnya, dengan adanya inovasi ini

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

masyarakat akan mendapatkan kemudahan aksesnya untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang lainnya.

## **3.2 Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT**

### **3.2.1 Kestabilan Jaringan Suatu Daerah**

Mengakses sebuah informasi di situs website memerlukan jaringan internet yang stabil. Di Indonesia sudah banyak provider-provider yang menunjang dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membantu mempermudah mengakses situs-situs website berupa jaringan internet. Berdasarkan laporan yang dikutip dari situs <https://content.akamai.com/>, kecepatan internet di Negara Indonesia menempati peringkat ke-93 di Asia Pasifik.<sup>9</sup> Hampir semua wilayah-wilayah di Indonesia sudah terjamah jaringan internet, walaupun memang ada beberapa wilayah yang medan tempuhnya sedikit sulit atau bisa dkatidakan pada wilayah pedalaman, namun mayoritas masyarakat Indonesia sudah paham dalam menggunakan internet itu sendiri.

Desa Sendang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Wonogiri yang letidaknya cukup strategis dan merupakan daerah yang sudah terjamah oleh jaringan internet. Namun di sisi lain masyarakatnya hanya menggunakan alat komunikasi sekedar untuk sms dan telepon.

---

<sup>9</sup>Fadly Yanuar Iriansyah. *Perbandingan Paket Internet Tercepat dari Provider Internet Broadband di Indonesia*. <https://id.techinasia.com/inilah-4-provider-internet-broadband-di-indonesia> diakses pada tanggal 27/3/2017 pukul 11:15 WIB

Pernyataan tersebut dari salah satu warga Desa Sendang, yaitu Ibu Tri Wartini dengan pernyataannya, sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Daerah Sendang memang susah sinyal, hanya 2 jaringan yang bisa tersambung dengan internet, itupun koneksinya sangat lambat. Desa Sendang kan daerahnya berada di pegunungan, jadi susah sinyal. Dulu saja tidak ada tower pemancar sinyal, jadi rumah-rumah yang ada diatas ya tidak pernah bisa sms atau telepon.”

Dari pernyataan tersebut, di dukung pula oleh pernyataan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang bahwa di Desa Sendang mayoritas warganya hanya menggunakan telepon genggamnya untuk telepon dan sms. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Sutanti, sebagai berikut:

“Rata-rata masyarakat menggunakan alat komunikasi hanya sekedar sms dan telepon. Masyarakatnya masih banyak yang belum mengetahui bagaimana dan apa manfaat dari internet itu kok. Di rumah-rumah saja kalau tidak menggunakan parabola tidak bisa nonton tv, yang bisa di lihat hanya TVRI.”

Terkait dengan alat telekomunikasi, untuk kalangan masyarakat Indonesia *handphone* merupakan alat komunikasi yang wajib untuk dimiliki. Sama halnya di Desa Sendang, sebagian besar penduduknya yang berjumlah 4002 jiwa ini memiliki ponsel namun sedikit dari mereka yang tidak menggunakan internet. Namun di Desa Sendang jaringan internetnya masih belum begitu stabil seperti pada daerah-daerah kota lainnya. Hal ini merupakan salah satu pernyataan dari Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Warga Desa Sendang, Ibu Tri Wartini. Pada tanggal 4 Februari 2017.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

“Mengingat lokasi desa yang berada di pegunungan, sehingga hanya di beberapa titik tertentu sinyal provider itu tidak ada namun untuk keseluruhan sinyal di Desa Sendang itu stabil.”

Dapat dilihat dari pernyataan Kepala Desa Sendang, benar adanya penduduk di Desa Sendang sudah banyak yang memiliki ponsel namun masih banyak pula yang tidak dapat menggunakan internet. Adanya kondisi yang demikian, penulis mencoba turun ke lapangan dan mencoba menggunakan beberapa macam provider untuk menguji kestabilan koneksi jaringan di desa tersebut. Setelah mencoba di beberapa pedukuhan dengan medan permukaan daratnya naik turun, memang benar adanya bahwa jaringan beberapa provider tidak stabil bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Walaupun ada sinyal namun saat digunakan untuk mengakses internet juga sangat lambat. Salah satu warganya pun menyatidakan hal yang sama, Ibu Ani selaku warga di Desa Sendang memberi pernyataan, sebagai berikut:<sup>12</sup>

“Disini memang susah sinyal. Kalau untuk telepon dan sms bisa, tapi kalau untuk internet memang harus pakai kartu yang lain. Kalau dibawah ada sinyal buat internetan, tapi kalau sudah diatas sini ya tidak ada.”

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa memang di Desa Sendang koneksi jaringan beberapa provider tidak begitu stabil. Ini merupakan masalah yang serius untuk Pemerintah Daerah untuk membenahi dan memecahkan masalah yang ada di tempat-tempat tertentu yang tidak terjangkau jaringan koneksi untuk mengakses internet. Sudah sewajibnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Warga Desa Sendang, Ibu Ani. Pada tanggal 8 Februari 2017.



Mengakses informasi di Desa Sendang jika melalui internet memang sulit karena medan permukaan yang memang berada di lereng gunung. Baru belakangan ini provider dibangun di Desa Sendang guna menunjang dan mempermudah masyarakatnya untuk mengakses internet.

Jika ditingkat desa jaringannya belum begitu stabil, namun untuk ditingkat Kabupaten jaringan internetnya sudah cukup stabil. Hal ini memang tidak bisa dibuktikan dengan data yang valid pada tahun 2016 karena dari Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri belum memiliki data-datanya secara terperinci. Namun pada akhir tahun 2016 yaitu pada bulan November, Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri telah memiliki data-data tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dian Ari selaku Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi, sebagai berikut:<sup>13</sup>

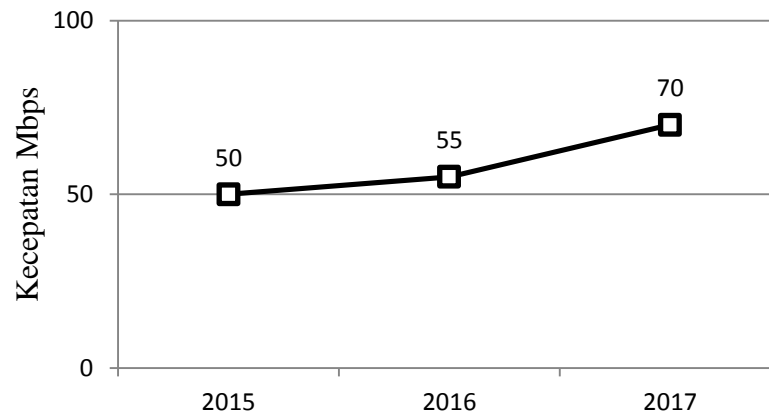
“Kalau untuk daerah kabupaten memang sudah stabil. Kecepatan akses internetnya pada tahun 2017 sudah lebih stabil dari tahun sebelumnya. Detailnya tahun 2016 secara keseluruhan memang tidak ada karna sistemnya belum dibuat, namun untuk akhir 2016 sudah ada yaitu bulan November dan Desember. Namun kalau untuk data kecepatan di Desa, hingga saat ini masih belum dapat dilakukan karena keterbatasan biaya.”

Kecepatan kestabilan jaringan di Kabupaten Wonogiri memang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berikut ini grafik kecepatan jaringan di Kabupaten Wonogiri tahun 2015-2017, yaitu:

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri, Bapak Dian Ari. Pada tanggal 2 Mei 2017.

**Grafik 1**  
**Kecepatan Jaringan di Kabupaten Wonogiri**



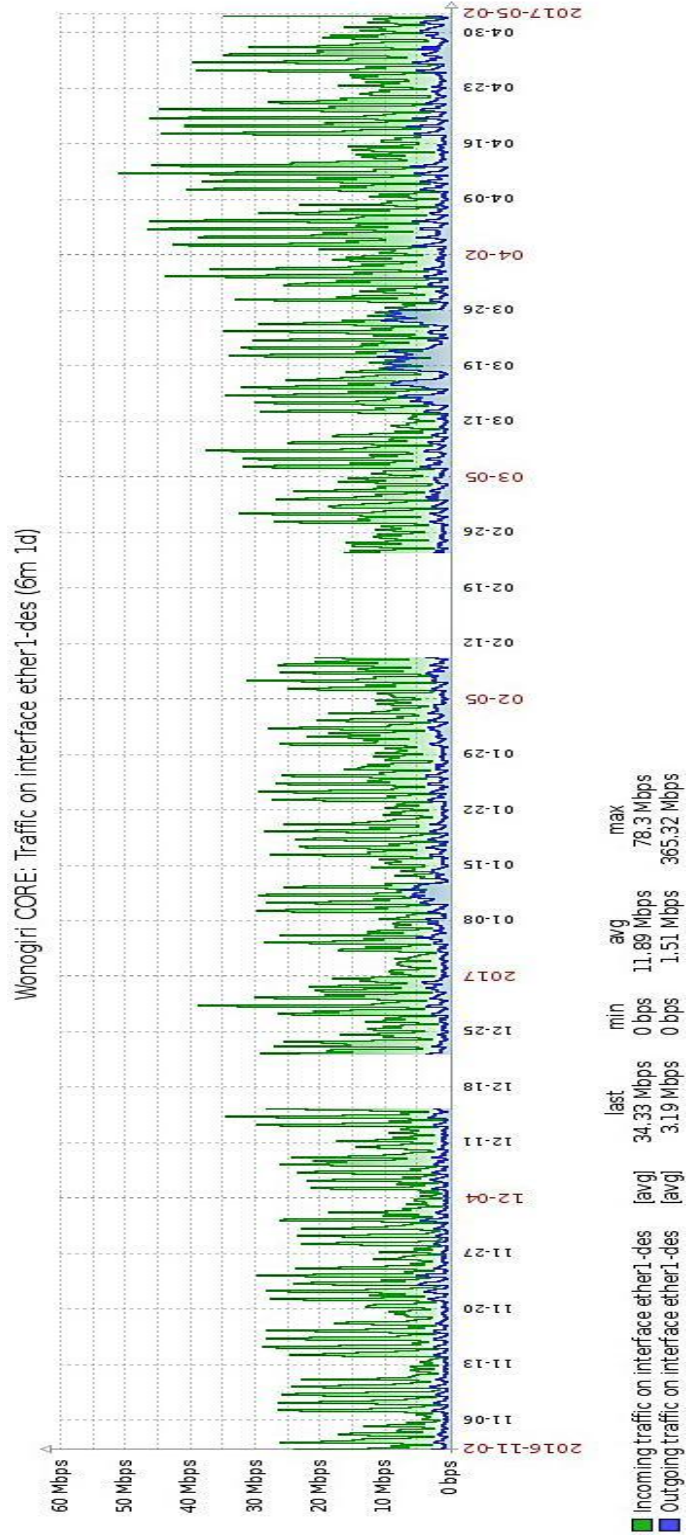
\*Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri

Dilihat dari grafik diatas, memang dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun kecepatan akses di Kabupaten Wonogiri, dimana pada tahun 2015 kecepataannya 50 Mbps, pada tahun 2016 sedikit meningkat menjadi 55 Mbps, sedangkan pada tahun 2017 meningkat pesat hingga 70 Mbps. Dengan kecepatan akses yang sedemikian rupa, semua akses internet di Kabupaten Wonogiri sudah dapat dikatidakan stabil.

Selain kestabilan akses jaringan di atas, berikut ini adalah grafik kecepatan akses internet pada bulan November 2016 hingga bulan April 2017 (6 bulan terakhir), yaitu:

Grafik 2

Kecepatan Akses Internet di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2017



\*Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri

Jika dilihat dari grafik diatas, mulai bulan November hingga bulan April memang naik turun namun pada bulan Maret-April 2017 mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dari bulan November, memang bulan Maret dan April adalah bulan tercepat dan terstabil untuk mengakses internet. Pada grafik sebelumnya memang pada tahun 2017 ini kecepatan akses internetnya mencapai angka 70 Mbps, namun ternyata di dalam grafik 3.2 tersebut mencapai angka 78,3 Mbps.

Adanya peningkatan ini, berarti Pemerintah Daerah memang sudah ada perhatian khususnya dibidang pengembangan informasinya. Adanya kestabilan akses inilah yang nantinya akan dapat digunakan dengan maksimal oleh masyarakat. Dilain sisi, memang untuk perhatian desa belum begitu maksimal karena di Desa Sendang sendiri masih ada beberapa titik jaringan yang belum stabil.

### **3.2.2 Tingkat Penggunaan IT pada Masyarakatnya**

Tingkat penggunaan IT di Indonesia memang sangat tinggi. Data yang diambil dari US Cencus Bureau pada tahun 2015 menjelaskan bahwa pengguna telepon seluler telah melebihi dari 281 juta yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia per awal tahun 2014 baru mencapai 251 juta jiwa. Fakta ini membuktikan bahwa kebutuhan akan dunia komunikasi dan informasi sangat tinggi di Indonesia. Diprediksi pengguna media sosial akan terus melonjak seiring dengan lintas

generasi melek internet yang akan tumbuh menua dan generasi muda yang paham dengan internet terus melaju seiring dengan berjalannya waktu.<sup>14</sup>

Desa Sendang merupakan salah satu desa yang sudah terjamah oleh kemajuan IT-nya, walaupun tidak semua warganya dapat menggunakan IT. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sendang, yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut:

“Warga kami, terutama yang dusun Sendang sudah paham tentang internet. Memang keseluruhan Desa Sendang 98% sudah memiliki handphone, tapi masih sebagian yang dapat menggunakan internet. Memang belum ada penelitian berapa jumlah pastinya warga yang sudah dapat menggunakan internet atau belum. Mengingat lokasi desa yang berada di pegunungan hanya di beberapa titik tertentu sinyal provider itu tidak ada namun untuk keseluruhan sinyal di Desa Sendang itu stabil.”

Mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di desa tersebut usia produktif sekolah dan usia produktif bekerja yang mana sudah *melek* teknologi dan dapat menggunakan internet dengan baik. Ini disampaikan pula oleh Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Saya kira sudah lumayan. Bisa dilihat dari mereka mengunggah objek wisata desa itu sudah lumayan.”

Perbedaan pendapat dan sudut pandang dalam suatu organisasi/lembaga memang sudah biasa terjadi, hal ini pun juga terjadi pada aparatur di Kantor Desa Sendang, yaitu dari Kepala Urusan

---

<sup>14</sup>Bursadana. 2017. *Jumlah Pengguna Ponsel di Indonesia*. <http://media.bursadana.co.id/2016/03/18/jumlah-pengguna-ponsel-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 29/03/2017 pukul 19:13 WIB.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.

Pemerintahan yang memberikan pernyataan yang berbeda dengan pernyataan diatas. Pernyataan dari Ibu Sutanti yaitu, sebagai berikut:<sup>16</sup>

“Rata-rata masyarakat menggunakan alat komunikasi hanya sekedar sms dan telepon. Masyarakatnya masih banyak yang belum mengetahui bagaimana dan apa manfaat dari internet itu. Konter-konter yang menjual paket data internet disini juga mahal, apalagi disini mayoritas warganya sudah tua jadi tidak tahu apa itu internet, anak muda disini banyak yang merantau ke Jakarta.”

Dilihat pada bab II pada tabel tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sendang yang mayoritasnya hanya berpendidikan sampai dengan SD, hal ini dapat mempengaruhi pola pikir seseorang bagaimana dia membuka diri dengan kemajuan teknologi dan rasa ingin tahunya akan semakin meningkat sehingga angka melek teknologi akan lebih meningkat. Apabila ditelaah dengan logika memang seharusnya tingkat pendidikan bukan menjadi salah satu faktor dalam penggunaan IT, namun mayoritas dari hasil observasi memang mayoritas yang dapat menggunakan IT sebagai media mencari informasi di wilayah Desa Sendang adalah para pelajar dan beberapa warganya yang berusia produktif yang masih aktif bekerja.

Dengan pekerjaan mayoritas penduduk Desa Sendang adalah petani, banyak dari mereka yang beranggapan IT itu tidak penting dalam pekerjaannya. Banyak dari mereka yang tidak membutuhkan IT karena memang keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, sehingga mereka tidak mau membuka diri untuk belajar menggunakan IT sebagai salah satu media untuk mencari suatu informasi. Hal ini merupakan salah satu jawaban

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang, Ibu Sutanti. Pada tanggal 30 Januari 2017.

penduduk Desa Sendang yang bekerja sebagai petani yaitu Ibu Saminah, sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Saya ini cuma petani, untuk apa petani tau internet. Kalau ada apa-apa, saya tanya anak yang tau, kalau saya disuruh belajar juga tidak mau, tidak ada waktu, lebih baik waktunya saya gunakan untuk menanam padi di sawah. Kebutuhan makan sehari-hari saja saya susah, apalagi kalau harus beli hp yang bagus, saya tidak sanggup.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang beberapa penduduk di Desa Sendang masih menganggap bahwa penggunaan IT sebagai salah satu media untuk mencari informasi tidaklah penting, terlebih penggunaan IT dirasakan sangat membutuhkan biaya yang banyak karena harus memiliki *smartphone*. Ini yang menjadi salah satu faktor dimana penduduknya tidak menggunakan IT sebagai mana mestinya, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Demikian dapat menjadi sorotan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk dapat mengembangkan dan memberikan fasilitas umum untuk masyarakatnya dalam hal penggunaan IT dan kemudahan dalam mendapatkan informasi.

Data valid terkait dengan tingkat penggunaan IT dari tahun ke tahun memang tidak ada. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dian Ari selaku Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi, sebagai berikut:<sup>18</sup>

“Data tentang tingkat penggunaan IT pada masyarakat Desa Sendang memang belum ada. Kita belum pernah mengadakan survei maupun penelitian kuesioner terkait hal tersebut.”

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Warga Desa Sendang, Ibu Saminah. Pada tanggal 9 Februari 2017.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri, Bapak Dian Ari. Pada tanggal 2 Mei 2017.

Dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten hingga tahun 2017 tidak memiliki data terkait dengan tingkat penggunaan IT. Dengan adanya hal ini, maka tidak ada data dan tidak ada perbandingan dari tahun ke tahun, meningkat atau tidakkah penggunaan IT di Kabupaten Wonogiri.

### **3.3 Sumber Daya Manusia**

#### **3.3.1 Kualitas Aparatur Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri**

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah ditujukan kepada masyarakatnya dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam melakukan suatu kebijakan, pemerintah memerlukan sumber daya manusia. Konteks yang ada disini adalah aparatur pemerintahannya yang nantinya akan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan dan dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat, dengan begitu suatu pemerintahan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

Terkait dengan adanya Undang-Undang Desa, dalam menjalankan undang-undang tersebut tentulah aparaturnya harus memiliki kesiapan dan kemampuan yang matang. Penyiapan aparat dan masyarakatnya dapat meliputi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a.) Pemahaman yang utuh tentang Undang-Undang Desa harus disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan desa (Pemdes, BPD, Organisasi Warga dan Tokoh Adat)

---

<sup>19</sup>Gobierno. 2015. *Kesiapan Desa dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Desa*. [https://es.slideshare.net/desa\\_institute/kesiapan-desa-dalam-mengimplementasikan-uu-desa-53785021](https://es.slideshare.net/desa_institute/kesiapan-desa-dalam-mengimplementasikan-uu-desa-53785021) diakses pada tanggal 05/04/2017 pukul 07:04 WIB.



- b.)Penyadaran masyarakat bahwa implementasi Undang-Undang Desa berbasis modal sosial yang berkarakteran saling percaya
- c.)Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran keuangan desa agar dalam pengelolaan oleh Pemerintah Desa dapat akuntabel, partisipatif dan transparan
- d.)Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, BPD, Kelompok Masyarakat Desa, SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Di tingkat desa, mengimplementasikan suatu kebijakan bergantung pada kesiapan dan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur Pemerintah Desanya. Jika kebijakan sudah matang dalam segala hal, namun aparturnya tidak siap dan tidak mampu maka kebijakan tersebut nantinya apabila diimplementasikan kepada masyarakat tidak akan berdampak secara signifikan.

Desa Sendang merupakan salah satu desa penerima dana desa, dimana dengan kata lain Desa Sendang berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa, namun hingga saat ini desa tersebut belum memiliki website. Di Kabupaten Wonogiri, hanya ada satu desa yang memiliki website, yaitu Desa Bulusulur dengan alamat websitenya <http://bulusulurwonogiri.desa.kemendesa.go.id/>. Kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan program website memang menjadi salah satu faktor penting, karena dalam mengelola website tidaklah mudah.

Aparatur Desa Sendang dalam menyikapi hal terkait dengan adanya website sebagai salah satu hak desa dan sebagai jalan untuk memperbaiki

pelayanan publik sebenarnya sudah di persiapkan sejak adanya Undang-Undang Desa, hal ini juga merupakan salah satu pernyataan dari Kepala Urusan Pemerintahan yaitu Ibu Sutanti, sebagai berikut:<sup>20</sup>

“Ya mempersiapkan. Siap tidak siap ya kami harus tetap mempersiapkan. Jika memang dituntut ya pasti ada pelatihan-pelatihan atau pasti ada pengarahan dari Kab. jadi setiap desa pasti bisa mempersiapkan itu. Dulu, sistem internet itu sendiri kan harus menganggarkan dana dan mungkin penggunaannya lain-lain lagi, aksesnya gitu. Kalau disini kan agak dekat dari kota jadi informasinya bisa cepat.”

Terkait dengan pernyataan tersebut, disampaikan pula oleh Sekretaris Desa Sendang bahwa aparatur desanya memang sudah mampu untuk menjalankan pelayanan publik yang berbasis elektronik. Pernyataan Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Insyallah mampu. Itu nyatanya kita menyesuaikan profil desa yang diinput juga sudah selesai, dari 9 desa di kecamatan kan baru 2 desa.”

Dengan adanya pernyataan tersebut, memang aparatur Desa Sendang antara sudah siap dan mampu atau belum dalam menjalankan tugas-tugasnya yang nantinya akan berbasis elektronik belum begitu jelas karena dapat dilihat dari jawaban saat wawancara yang tidak memberikan pernyataan secara tegas. Hal ini dapat dipengaruhi pula karena faktor pendidikan, karena mayoritas aparatur Desa Sendang berpendidikan SMA. Berikut rincian daftar tingkat pendidikan terakhir aparatur Desa Sendang, yaitu:

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang, Ibu Sutanti. Pada tanggal 30 Januari 2017.

**Tabel 23**

**Tingkat Pendidikan Akhir Aparatur Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri**

No.	Nama	Pendidikan
1.	Budi Handono	SMA
2.	Agung Susanto	SMA
3.	Sutanti	SMA
4.	Suyadi	SMA
5.	Dwi Hananti	SMA
6.	Aria Bagas Herbangun	SMA
7.	Sukatno	SD
8.	Sutarno	SD
9.	Setu	SD
10.	Lagiyo	SD

\*Sumber: Kantor Desa Sendang

Dari tabel di atas memang membuktikan bahwa mayoritas aparatur Desa Sendang berpendidikan akhir tingkat SMA. Hal ini dapat mempengaruhi cara berfikir dan kemampuan serta kesiapan aparatur dalam menjalankan pelayanan publik yang nantinya akan berbasis elektronik. Karena aparatur di Desa Sendang tidak ada yang PNS maka kemungkinan besar akan ada kendala apabila tidak diikuti dengan adanya pengembangan kemampuan terkait dengan penggunaan dan operasional terkait dengan pelayanan publik berbasis elektronik.

**3.3.2 Kuantitas Aparatur Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri**

Suatu instansi pemerintah tidak akan berjalan dengan baik dalam melakukan suatu kebijakan atau pelayanan publiknya jika tidak memiliki aparatur atau sumber daya manusia. Jumlah aparatur atau sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari sebuah proses pelayanan. Apabila jumlah aparturnya memadai, maka proses pelayanan dan berbagai macam kebijakan akan dapat tertangani dengan

cepat dan benar, namun apabila jumlah aparturnya tidak memadai maka akan menciptakan proses pelayanan yang memakan waktu sangat lama dan tidak akan maksimal karena seorang aparaturnya akan menjalankan beberapa tugas. Dengan demikian nantinya akan terjadi tumpang tindih antara tupoksi-tupoksi yang ada pada sebuah instansi/organisasi.

Seperti yang terjadi di Kantor Desa Sendang, untuk ukuran desa yang berada dekat dengan Kantor Kabupaten/Kota Wonogiri jumlah aparturnya dapat dikatakan tidak memadai sehingga terjadi tumpang tindih antara tupoksi-tupoksi setiap aparturnya. Hal ini di nyatidakan pula oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang yaitu Ibu Sutanti, sebagai berikut:<sup>22</sup>

“Kalau untuk yang masuk di SK hanya 10 orang. Kalau menurut saya, kalau 10 orang dengan 12 dusun disini itu, ada pula dusun yang belum punya Kadusnya. Ada yang Kadus itu merangkap jadi 2 dusun jadi 1. Dulu memang begini, ada wacana untuk perampingan perangkat dengan asumsi Kadus itu bisa membawahi beberapa dusun karena kewilayahan, gitu lho. Nanti kalau itu memang dikehendaki dari Pemda, ya mungkin akan ada tindak lanjutnya, tapi kalau sekarang ada yang dusunnya tidak ada Kadusnya begitu. Yang tidak ada Kadusnya itu nanti akan ada yang mewakili seperti di PJ kan begitu. Jadi ditunjuk salah satu yang bisa mewakilkan dusunnya, jadi tidak resmi.”

Hal yang sama pun di sampaikan langsung oleh Kepala Desa Sendang bahwa di sumber daya manusia yang ada di Kantor Desa Sendang tidak sesuai dengan tupoksinya, sehingga beberapa dari aparturnya masih banyak

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang, Ibu Sutanti. Pada tanggal 30 Januari 2017.

yang merangkap 2 jabatan sekaligus. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut.<sup>23</sup>

“Staf kami saat ini berjumlah 10 itu dengan saya sendiri. Dari 12 dusun, 27 RT, 8 RW, kami saat ini ada 10 personil termasuk Kades, sehingga memang ada beberapa kadus yang mengampu dusun yang lain untuk memberikan sarana informasi. 10 personil ini menurut saya belum cukup, jadi untuk standarisasi ya 12 dusun itu kalau saya ya 12, jadi 13 dengan Kepala Desa. Sehingga nanti di dalam proses penyampaian informasi yang disampaikan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dapat cepat tersalurkan.”

Dari semua aparaturnya memang di Desa Sendang memiliki rangkap jabatan yang mana 5 dari 10 aparaturnya merangkap 2 jabatan. Dalam hal ini, saat melakukan pelayanan publiknya memang semua masih bergotong royong bersama saling membantu, karena aparatur Desa Sendang menyadari bahwa mereka kekurangan sumber daya manusia, sehingga saat masyarakatnya melakukan pelayanan publik dan tidak bisa di tangani sendiri oleh bagian yang bersangkutan, maka bagian tupoksi yang lain akan ikut membantu. Berikut ini rincian struktur jabatan aparatur pemerintah Desa Sendang, yaitu:

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

**Tabel 24**

**Struktur Jabatan Aparatur Pemerintah Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri**

No.	Nama	Jabatan
1.	Budi Handono	Kepala Desa/Lurah
2.	Agung Susanto	a. Sekretaris Desa/Carik b. Kepala Dusun Godean
3.	Sutanti	a. Bendahara Desa b. Kaur Pemerintahan
4.	Suyadi	a. Kaur Kesejahteraan Masyarakat b. Kasi Kesejahteraan Masyarakat
5.	Dwi Hananti	a. Kasi Pemerintahan b. Kepala Dusun Jajar
6.	Aria Bagus Herbangun	Kasi Pembangunan Kepala Dusun Kedungaren
7.	Sukatno	Kepala Dusun Bendorejo
8.	Sutarno	Kepala Dusun Gondanglegi
9.	Setu	Kepala Dusun Nglegong
10.	Lagiyo	Kepala Dusun Kembang

\*Sumber: Kantor Desa Sendang

Terlihat pada tabel tersebut memang benar adanya beberapa aparturnya merangkap jabatan lebih dari satu. Sebelumnya Kantor Desa Sendang sudah pernah mengajukan dan mengkomunikasikan dengan pihak Pemerintah Daerah dalam rangka permohonan tenaga bantu atau penambahan sumber daya manusia untuk Kantor Desa Sendang, namun hingga saat ini belum ada rekrutmen terkait dengan hal tersebut dan pihak dari Pemerintah Daerah hingga saat ini belum memberikan penjelasan secara jelas. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut.<sup>24</sup>

“Dalam proses pelaksanaannya kami memiliki banyak kendala, ya ini kami sudah coba untuk membicarakan dengan Bapak Bupati

<sup>24</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

supaya nanti ada proses perekrutan/penambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum ada tidak lanjutnya hingga saat ini.”

Dari pernyataan-pernyataan diatas dan dengan data-data yang ada serta observasi yang telah dilakukan, sebelum adanya Undang-Undang Desa ini memang sebenarnya desa belum memiliki perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerahnya, padahal dengan adanya perhatian-perhatian khusus terhadap desa maka akan lebih mudah bagi desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada.

### **3.4 Infrastruktur Kelembagaan**

#### **3.4.1 Kepentingan yang Terpengaruh oleh Kebijakan**

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti nantinya akan banyak kepentingan-kepentingan yang terpengaruh. Tidak hanya aparatur pemerintah saja yang akan terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan tersebut, namun masyarakatnyapun juga akan terpengaruh karena pada dasarnya kebijakan dibuat ditujukan kepada masyarakat. Pemerintah adalah sebagai fasilitator pelayanan untuk masyarakat. Suatu kebijakan memiliki 2 sisi layaknya rupiah, dari kebijakan yang telah diterapkan di dalam tatanan masyarakat akan tetap menimbulkan pra dan kontranya, banyak kepentingan yang akan terpengaruhi sehingga pemerintah harus bekerja lebih keras agar suatu kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat dengan baik.

Adanya dana desa yang merupakan salah satu angin segar bagi Pemerintah Desa, pasalnya kebijakan yang dibuat ini untuk mengembangkan infrastruktur dan potensi-potensi yang ada di setiap desa

yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu terobosan pemerintah. Pada awal isu ini terdengar memang dana desa mendapat sorotan dari banyak pihak dan menuai banyak pro dan kontra, mulai dari mampukah aparatur desa menyerap dana ataupun kekhawatiran terhadap penggunaan dana yang rawan akan terjadinya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Setelah dana tersebut sudah pasti di berikan kepada desa, barulah ada banyak sosialisasi-sosialisasi terkait dengan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap dana tersebut yang mana telah diturunkan pada pertengahan tahun 2016 lalu. Banyak pihak yang ikut dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan tersebut, sehingga akan dipastikan dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Di tingkat desa ada PWD, LPM, tim pelaksana dan masing-masing dusun juga ada tim biar ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga banyak yang ikut berpartisipasi untuk ikut melakukan terhadap proses pengawasan dana desa ini dan pelaksanaan pembangunan.”

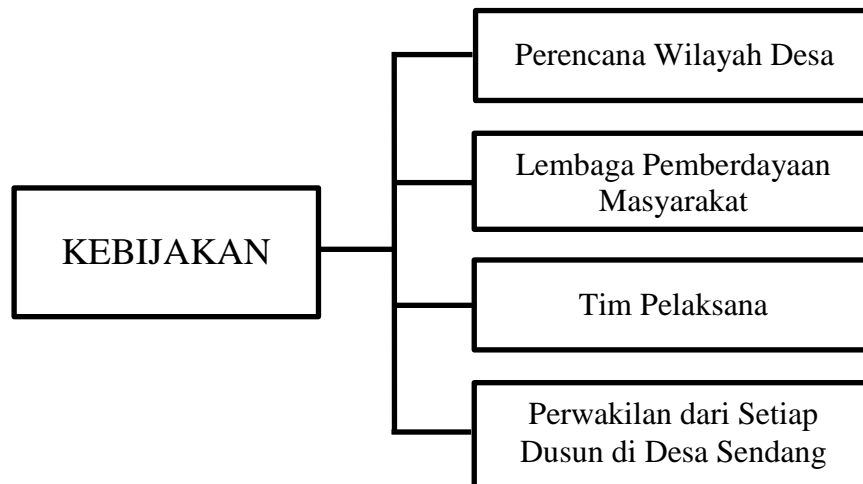
Dari pernyataan diatas, dapat digambarkan dengan skema bahwa kepentingan yang akan terpengaruh dalam setiap kebijakan di Desa Sendang adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.



**Bagan 4**  
**Kepentingan yang Terpengaruh oleh Kebijakan**



Memang sudah hakekatnya seperti demikian, akan ada banyak pihak yang terpengaruh oleh suatu kebijakan. Kebijakan itu sendiri tidak hanya terdiri dari satu komponen, namun terdapat beberapa komponen di dalamnya. Komponen-komponen tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a.) Isi kebijakan, untuk apa kebijakan itu dibuat dan apa yang akan dilakukan dengan kebijakan itu sendiri. Isi dari sebuah kebijakan seharusnya dapat memberi solusi terhadap banyaknya masalah publik yang mencangkup berbagai bidang kehidupan.
- b.) *Stidakeholder*, jadi pihak-pihak mana saja yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.
- c.) Lingkungan, dimana nantinya lingkungan inn menjadi faktor terpenting dalam penentu keberhasilan suatu kebijakan tersebut karena

<sup>26</sup>Budi Wahyono. 2015. *Pendidikan Ekonomi, Sistem dan Komponen Kebijakan Publik*. <http://www.pendidikanekonomi.com/2015/01/sistem-dan-komponen-kebijakan-publik.html> diakses pada tanggal 06/04/2017 pukul 10:20 WIB.

apabila kebijakan diimplementasikan, apakah akan mendapat dukungan atau penolakan dari para aktor pelaksananya atau sasaran kebijakan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Desa ini juga mengatur terkait dengan pengembangan sistem informasi desanya yang dapat diwujudkan dengan adanya website. Apabila Pemerintah Daerah menghendaki dana desa dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi desanya, maka akan ada banyak pihak yang terpengaruh dari kebijakan tersebut, diantaranya Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan pihak ketiga ini yang biasanya Pemerintah Desa bekerjasama dengan swasta untuk urusan pengelolaan jaringan internet dan pengadaan barang-barang penunjangnya. Namun sayangnya, Kabupaten Wonogiri belum menghendaki dengan adanya dana desa dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi desanya karena dana desa untuk saat ini memang khusus diperuntukkan untuk pengembangan infrastruktur pembangunan saja.

Selama ini memang belum dilaksanakan program pengembangan sistem informasi desa tersebut karena memang biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit dan jika diambil dari dana desa harus melalui persetujuan Pemerintah Daerah sedangkan Pemerintah Daerah menghendaki dana tersebut untuk pengembangan infrastruktur saja. Hingga saat ini dana desa yang digunakan pun juga jelas, yaitu untuk pembangunan talud dan rabat

beton di setiap pedukuhan di Desa Sendang. Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Sebenarnya kami dulu sudah mau membuat namun biayanya mahal, kami juga memikirkan masyarakatnya bisa paham atau tidak jika kita punya website, ya mengingat disini mayoritasarganya tidak bisa mengakses internet.”

Dengan pernyataan tersebut, memang dapat diketahui bahwa dengan kebijakan yang akan diambil nantinya akan menyulitkan atau mempermudah akses masyarakatnya. Perlu diingat kembali bahwa dengan adanya website ini nantinya bukan hanya masyarakat Desa Sendang saja yang mengaksesnya, namun juga masyarakat luas dalam maupun luar Indonesia.

### **3.4.2 Struktur Organisasi Pelaksana Pelayanan Publik**

Menjalankan sebuah kebijakan ataupun apapun itu pasti akan terlaksana dengan semestinya apabila organisasi pelaksananya memiliki struktur yang baik dan memadai. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan memang struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang penting karena nantinya struktur organisasi inilah yang akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperlancar pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, struktur organisasi pemerintahan desa mengalami perubahan. Jika dalam Undang-Undang Desa lama yaitu Nomor 32 Tahun 2004 struktur organisasi pemerintahan desa

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.

utamanya perangkat desa diatur maksimal 5 jabatan Kepala Urusan (KAUR), akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terjadi perubahan yakni posisi KAUR ditetapkan maksimal 3 orang dan 3 lainnya merupakan jabatan teknis yang berada di bawah Kepala Desa.<sup>28</sup>

Perangkat Desa di Kabupaten Wonogiri khususnya di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri struktur organisasi pemerintahan desanya memang sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa yang baru, namun memang ada beberapa jabatan yang kosong sehingga ada beberapa aparatur yang merangkap jabatan tersebut. Hal ini disampaikan pula oleh Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>29</sup>

“Sebenarnya memang struktur organisasinya kita mengacu undang-undang dan perda namun masih kekurangan sumber daya manusianya. Seperti yang seharusnya kadus 12 orang ya hanya ada 6 orang, terus kaur yang harusnya ada 3 hanya ada 2.”

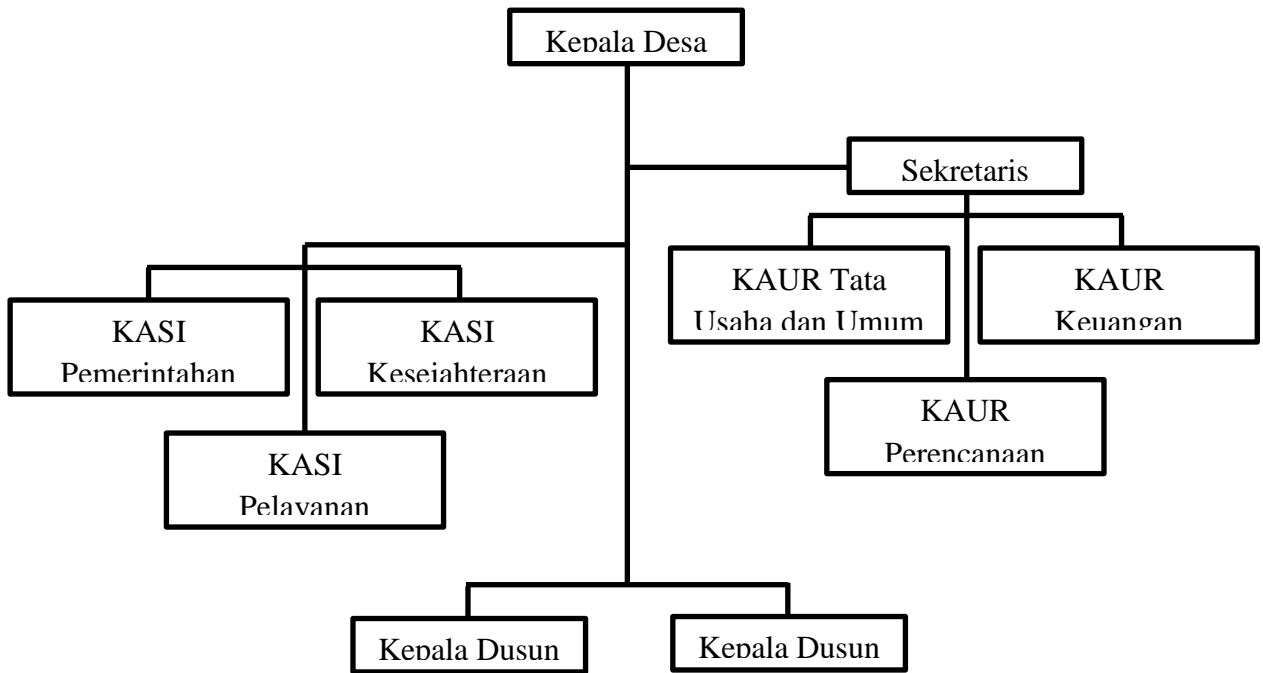
Selain berpedoman pada Undang-Undang Desa, struktur organisasi pemerintahan desa di Desa Sendang juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berikut perbandingan struktur organisasi pelayanan publik antara yang tertulis dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri dan Struktur Organisasi yang ada di Desa Sendang, yaitu:

---

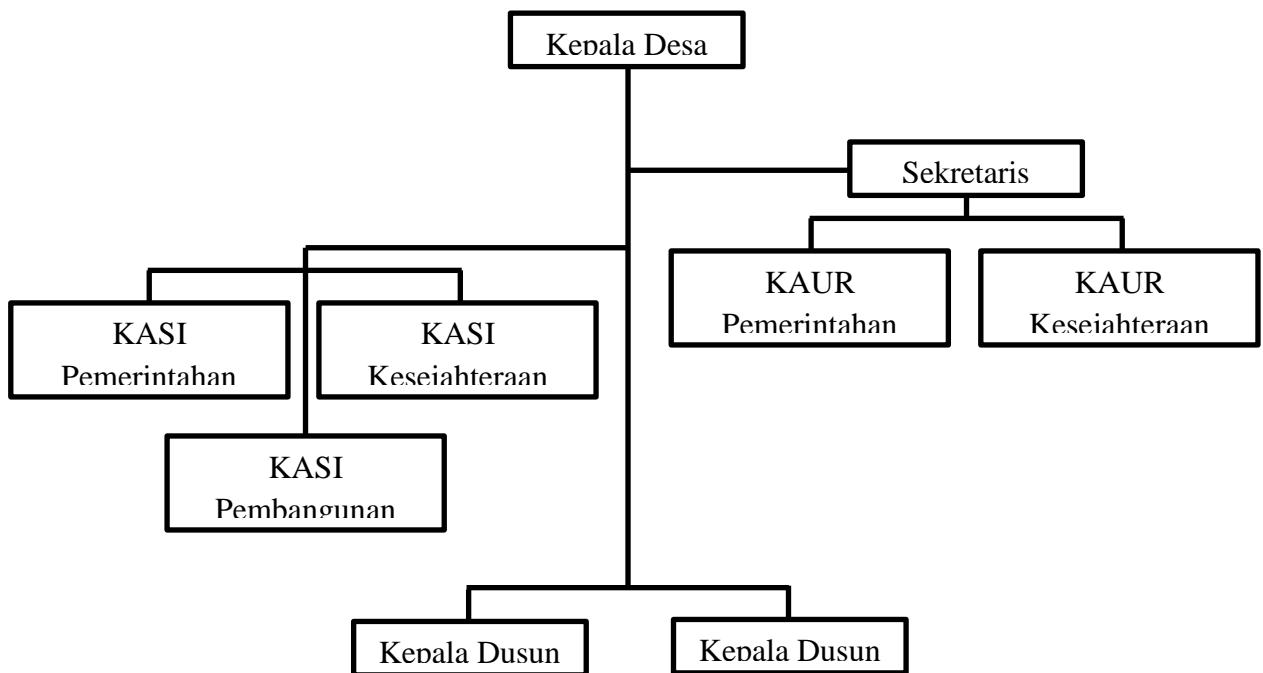
<sup>28</sup>Solehudin. 2016. *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016*. <https://pemdesbaik.wordpress.com/2016/01/16/susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemerintah-desa-tahun-2016/> diakses pada tanggal 06/06/2017 pukul 19:07 WIB.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.

**Bagan 5**  
**Struktur Organisasi Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Desa dan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri**



**Bagan 6**  
**Struktur Organisasi Perangkat Desa di Desa Sendang**



Di Undang-Undang Desa disebutkan terpadat 3 kepala urusan (kaur) yaitu, kaur tata usaha dan umum; kaur keuangan; dan kaur perencanaan, sedangkan pelaksana teknisnya ada 3 pula, yaitu kepala seksi pemerintahan; kepala seksi kesejahteraan; dan kepala seksi pelayanan. Struktur organisasi yang dimiliki Desa Sendang sedikit berbeda dengan Undang-Undang Desa dan Perda Kabupaten Wonogiri, perbedaannya adalah pada bagian kepala urusan dan pelaksana teknis. Dimana di Kantor Desa Sendang pada bagian kepala urusannya meliputi kepala urusan pemerintahan dan kepala urusan kesejahteraan masyarakat saja; sedangkan pada bagian pelaksana teknisnya meliputi kepala seksi pembangunan; kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan.

Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwasanya memang terdapat 1 jabatan yang kosong hingga saat ini. Padahal sebelumnya Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono mengatidakan bahwa struktur organisasi di Desa Sendang memang benar adanya diadopsi dari Perda Kabupaten Wonogiri, pernyataannya sebagai berikut:<sup>30</sup>

“Selama ini kami masih mengacu pada aturan lama sebelum besok Maret dikeluarkan SOTK baru dari Kabupaten, jadi garis kami vertikal, Kades membawahi kadus, sekdes membawahi kaur. Jadi tegak lurusnya kades ke kadus, kemudian sekdes tegak lurusnya kepada kaur, kalo besok di SOTK baru insyallah bulan Maret 2017 dari Bupati sehingga nanti ada Kasi dan Kaur serta ada Kadus kedepannya.”

Memang terdapat beberapa perbedaan antara struktur yang ada pada undang-undang dan Perda dengan antara struktur yang ada pada Pemerintah

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

Desa Sendang. Perbedaan inipun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh aparatur yang berada di kantor desa tersebut. Saat penulis menanyakan terkait hal tersebut, aparat di kantor tersebut pun tidak bersedia untuk memberikan keterangannya lebih lanjut.

## **B. Kegagalan Implementasi Sistem Informasi Desa**

### **3.1 Informasi**

Banyaknya informasi yang dimiliki setiap *stakeholders* dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu faktor yang dapat meyakinkan implementasi tersebut. Namun sebaliknya, apabila *stakeholders* ini memiliki sedikit informasi terkait dengan isi dari kebijakan tersebut maka informasi ini menjadi sebab kegagalan dari suatu kebijakan.

Di Desa Sendang, salah satu alasan mengapa sistem informasi desanya belum diterapkan karena kurangnya informasi terkait dengan pembuatan dan pengelolaannya secara mandiri. Banyak media untuk menyampaikan informasi, salah satu yang di rasa sangat efektif adalah dengan mengadakan sosialisasi. Di Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Daerahnya menggunakan cara bersosialisasi dalam menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa. Peruntukan dana desa yang di dapat Desa Sendang, dalam penggunaan dan pengelolaannya mendapatkan banyak informasi melalui sosialisasi dari Pemerintah Daerah.

Terkait dengan sosialisasi tersebut, dalam penggunaan dana desa yang jumlah tidak sedikit juga mengundang banyak pertanyaan dalam penggunaannya. Karna apa yang sudah tercantum pada Undang-Undang Desa seharusnya bisa terimplementasikan dengan baik setiap pasalnya. Salah satu hal yang tercantum

pada undang-undang tersebut adalah untuk mengembangkan sistem informasi desa, namun di Desa Sendang belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pengembangan sistem informasi desa. Hal ini merupakan pernyataan dari Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>31</sup>

“Belum pernah ada sosialisasi terkait dengan pengembangan sistem informasi desa atau pelayanan publik berbasis elektronik. Yang saya ketahui itu adanya pelatihan pengisian profil desa hanya itu saja, kalau yang lain belum ada. Seperti pelatihan keuangan itu kemaren kami mengadakan juga hanya 1 kecamatan, kalau dari kabupaten memang belum ada. Adanya dana peningkatan sumber daya manusia, perangkat desa. Itupun harus berkoordinasi dengan seluruh perangkat desa sekecamatan, ingin mengadakan apa. Kalau tahun 2016 itu tentang penyusunan RAB, pajak.”

Dari pernyataan tersebut terlihat memang Kabupaten Wonogiri belum ada arahan dan niat untuk desa agar dapat mengembangkan sistem informasinya sendiri. Selama tahun 2016, Pemerintah Daerah sudah melakukan beberapa sosialisasi kepada Pemerintah Desa Sendang beserta organisasi pendukungnya. Berikut rincian sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada desa:

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.



**Tabel 25****Jadwal Sosialisasi dari Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jadwal</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Pengembangan SDM	Kamis, 25 Februari 2016	TP PKK Desa pada Bidang Penguasaan, Pengelolaan UP2K	Aula Kecamatan Wonogiri
2.	Pengembangan Kemandirian Ibu Rumah Tangga	Selasa, 8 Maret 2016	Semua Anggota PKK	Aula Gedung PKK
3.	Penyusunan RAB	Jumat, 11 Maret 2016	Aparatur Desa	Aula Kecamatan Wonogiri
4.	Penyusunan Laporan Pajak	Selasa, 22 Maret 2016	Aparatur Desa	Aula Kecamatan Wonogiri
5.	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Rabu, 6 April 2016	Ketua TP PKK Desa	Aula Kecamatan Wonogiri
6.	Pengembangan Usaha Mandiri Kecil	Jumat, 20 Mei 2016	Semua Anggota PKK	Aula Gedung PKK
7.	Pelatihan Tata Rias	Sabtu, 16 April 2016 Senin, 16 Mei 2016	Semua Anggota PKK	Aula Gedung PKK
8.	Penggunaan Dana Desa dan Pembelanjaan Barang-Barang Pembangunan	Jumat, 20 Mei 2016	Kepala Desa, Sekretaris Desa, TPK, BPD, Dukuh, Tokoh Masyarakat	Aula Kecamatan Wonogiri

\*Sumber: Kantor Desa Sendang

Jika dilihat dari tabel diatas, memang pada tahun 2016 Pemerintah Daerah masih berfokus pada pengembangan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan penggunaan terkait dengan dana desa yang mana dana tersebut turun pada akhir bulan April 2016. Terlihat bahwasanya memang Pemerintah Daerah belum melakukan sosialisasi terkait dengan pengembangan website sebagai media

informasi dan pelayanan publiknya yang semula manual bergeser menjadi elektronik/*online*.

Informasi terkait dengan pengelolaan dari sistem informasi desa ini juga belum diketahui bagaimana caranya oleh para aparatur Desa Sendang, sehingga apabila sistem informasi desa ini diimplementasikan maka akan cenderung gagal jika tidak diberi sosialisasi secara rinci oleh Pemerintah Daerah.

### **3.2 Isi Kebijakan**

Mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi dari kebijakan publik yang dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Sehingga isi dari kebijakan publik ini harus jelas, tegas, dan mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh *stakeholders*.

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samanya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan *intern* atau *ekstern* atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

Suatu kebijakan atau keputusan yang dilakukan dan diambil oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah memang harus memiliki dasar/landasan hukumnya dalam menyelenggarakan suatu kebijakan agar nantinya setiap produk hukum yang berupa undang-undang yang nantinya akan dapat memberikan kekuatan dan kemapanan dari kandungan isi undang-undang dan juga isi dari kebijakan tersebut.

Termasuk terkait dengan sistem informasi yang memiliki landasan hukumnya sendiri diantaranya, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (IP-Based)

Di konteks pengembangan sistem informasi desa untuk Desa Sendang ini memang belum ada Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Wonogiri, yang ada di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa implementasi program sistem informasi desa di Kabupaten Wonogiri belum di kembangkan, karena memang tidak ada dasar hukumnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

Terdapat beberapa alasan mengapa di Kabupaten Wonogiri belum serius dalam mengembangkan sistem informasi desanya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri, Bapak Dian Ari sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonogiri, Bapak Dian Ari. Pada tanggal 18 Agustus 2017.

“Belum dibuat dasar hukumnya karena Pemerintah Desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Biaya yang dimiliki juga sangat terbatas, mungkin kedepannya ini menjadi agenda Pemerintah Daerah untuk merancang peraturan terkait dengan sistem informasi desa.”

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belum adanya dasar hukum terkait dengan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Wonogiri karena Pemerintah Daerah masih berfokus pada pengembangan infrastruktur dan adanya keterbatasan biaya, sehingga isi dari kebijakan Undang-Undang Desa terkait pengembangan sistem informasi desa belum dapat diimplementasikan.

Di Kabupaten Wonogiri sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, namun belum ada peraturan yang lebih spesifik ke informasi desa. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah untuk merancang dasar hukum tentang sistem informasi desa agar desa dapat mengembangkan sistem informasi desanya sehingga dapat mengimplementasikan sesuai dengan isi kebijakan dari undang-undang yang berlaku.

### **3.3 Dukungan**

Dukungan ini dapat berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit dilaksanakan. Dukungan yang disebutkan adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program. Jadi suatu program akan berlangsung berkelanjutan apabila partisipasi dukungan masyarakat tinggi dalam berbagai

tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun evaluasi setiap program yang akan dikerjakan.

### **3.3.1 Dukungan dari Pemerintah Daerah**

Selama ini setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah memang harus dijalankan dengan baik oleh aktor pelaksananya. Dalam konteks ini, aktor pelaksananya adalah Pemerintah Desa. Terkait dengan adanya Undang-Undang Desa, tentulah Pemerintah Daerah sebagai wadah komunikasi dan sebagai tempat bertukar informasi bagaimana yang seharusnya Pemerintah Desa lakukan agar undang-undang tersebut dapat diterapkan dan dapat diimplementasikan sebagai mana mestinya. Dukungan dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor keberhasilan dari suatu kebijakan untuk tingkat Pemerintah Desa, karena dengan adanya dukungan ini maka Pemerintah Desa akan merasa percaya diri untuk mengimplementasikannya dan merasa didampingi oleh Pemerintah Daerah sehingga apabila menemukan kesulitan-kesulitan akan dapat diselesaikan dengan mudah. Salah satunya adalah penerapan pelayanan publik berbasis elektronik dengan perwujudan adanya website.

Di Kabupaten Wonogiri sendiri, pelayanan publik berbasis elektroniknya belum semua diterapkan pada instansi-instansinya. Kabupaten Wonogiri sebenarnya sudah memiliki website sebagai salah satu media penyalur berbagai macam informasi sejak tahun 2010, namun website tersebut sering mengalami gangguan sehingga sulit untuk diakses. Pada pertengahan tahun 2014, website resmi Kabupaten Sendiri mengalami

gangguan selama kurang lebih 7 bulan dimana setiap sub-menu yang ada di halaman beranda apabila di *click* tidak dapat terbuka sebagai mana mestinya. Saat mencoba mengirimkan kritik dan saran melalui email yang tercantum pada halaman beranda pun tidak mendapatkan balasan hingga saat ini. Di halaman website resmi tersebut yang sering *update* adalah berita-berita terkini seputar perekonomian di Kabupaten Sendiri, untuk menu-menu yang lainnya memang *offline*. Dengan demikian, di Kabupaten Wonogiri memang website belum menjadi prioritas utama untuk melakukan pelayanan publiknya namun sudah menggunakan website sebagai media penyampaian informasi seputar berita-berita terkini yang ada di Kabupaten Wonogiri.

Desa Sendang hingga saat ini juga belum mengalokasikan dana desanya untuk program pengembangan sistem informasi desanya dengan perwujudan adanya website. Belum mengalokasikan dana tersebut karena memang di Kabupaten Wonogiri dana desa masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>33</sup>

“Sejauh yang saya ketahui, dana desa baru diberikan April 2016 dan sudah ada petunjuk penggunaannya, yaitu untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan masyarakat.”

Sebenarnya dukungan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, entah dari melakukan sosialisasi-sosialisasi ataupun dari peraturan langsung rincian penggunaan dana desa yang sebagaimana dana tersebut dialokasikan

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.

untuk pengembangan sistem informasi desa. Disisi lain, sebenarnya Pemerintah Daerah sudah memberikan dukungan terhadap desa namun karena keterbatasan dana desa, maka untuk tahun pertama dan kedua dana desa turun digunakan untuk pengembangan infrastruktur terlebih dahulu. Untuk di tingkat desa pelayanan publik berbasis elektronik memang akan sedikit menyulitkan beberapa masyarakat yang masih belum paham akan penggunaan pelayanan berbasis elektronik tersebut. Hal ini juga di jelaskan oleh Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>34</sup>

“Sebenarnya sudah sangat mendukung, tetapi masih banyak masyarakat disini yang masih tidak mengerti terkait dengan internet. Karena masalah kemaren itu saja terkait dengan e-ktp, banyak masyarakat yang masih tidak mengerti, mereka tidak tahu karena prosesnya yang agak rumit, ada sidik jari, retina, dll. Jadi masyarakat masih banyak yang belum paham. Jadi sosialisasi perintah dari Pemkab ini memang seharusnya dilaksanakan. Jadi tidak serta merta membuat e ktp, semua yang berbaur e- tapi disitu tidak ada rincian secara formalnya.”

Dengan apa yang sudah dijelaskan diatas, karena penggunaan IT di Desa Sendang juga masih tergolong rendah maka dari itu Desa Sendang belum mengalokasikan dana desanya untuk membuat website. Di Kecamatan Wonogiri, desa yang sudah berinisiatif untuk mengembangkan sistem informasi desanya baru Desa Bulusulur itu pun dana yang dikeluarkan tidak sedikit, yaitu sekitar 10juta. Apabila nantinya dalam rincian dana desa tersebut mengharuskan untuk mengalokasikan dananya untuk pengembangan sistem informasi desanya, maka Desa Sendang akan segera melaksanakan kebijakan tersebut, seperti yang sudah disampaikan

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

oleh Sekretaris Desa Sendang yaitu Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>35</sup>

“Memang kami sesuaikan dengan petunjuk pelaksana dari kabupaten tidak ada. Nah itu belum ada alokasi untuk sistem informasi. Nanti kalau sudah ada petunjuk dari kabupaten disuruh menganggarkan, ya nanti kita anggarkan. Sebenarnya kami dulu sudah mau membuat namun biayanya mahal, keperluan lain belum tercover sehingga dana yang ada digunakan untuk mencover itu dulu.”

Aparatur di Desa Sendang akan mengalokasikan dana tersebut apabila sudah ada petunjuk pelaksana dari kabupaten. Memang jika dilihat dari sisi kepatuhan kepada Pemerintah Daerahnya, memang aparatur Desa Sendang ini sangat patuh dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Disisi lain, seharusnya aparatur Desa Sendang berinisiatif sendiri untuk mengimplementasikan poin-poin penting yang ada di Undang-Undang Desa tersebut, mencontoh dari Desa Bulusulur walaupun di dalam rincian penggunaan dana desa tidak dicantumkan dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi desa, namun desa tersebut mampu mengimplementasikan program pengembangan sistem informasi desa berupa website.

### **3.3.2 Dukungan dari Masyarakat Setempat**

Selain dukungan dari Pemerintah Daerah, dukungan dari masyarakat setempat juga sangat penting dalam hal pengimplementasian suatu kebijakan. Bagaimana tidak, setiap kebijakan yang dibuat adalah untuk

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.



masyarakat sehingga kebijakan tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila masyarakat setempatnya juga ikut mendukung.

Desa Sendang merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri karena memiliki permukaan tanah bergelombang dan naik turun pegunungan. Desa Sendang merupakan desa dengan tingkat longsor cukup tinggi, hampir setiap hujan deras turun selama berjam-jam ada kasus tanah longsor entah di daerah pelosok maupun di daerah jalan provinsi sehingga menyebabkan macet hingga akses jalan terputus.

Sekarang dengan adanya dana desa yang penggunaannya memang di khususkan untuk pembangunan infrastruktur, maka dibangunlah beberapa talud dan rabat beton di setiap pedukuhan yang ada di Desa Sendang sehingga akan mengurangi titik rawan longsor dan beberapa jalan desa yang sebelumnya hanya dari tumpukan batu yang ditata rapi sekarang sudah menjadi cor beton. Banyak masyarakat Desa Sendang yang memberikan dukungannya terkait dengan dana desa ini, hal ini disampaikan oleh Kepala Urusan Pemerintahan yaitu Ibu Sutanti, sebagai berikut:<sup>36</sup>

“Masyarakat merasa senang dengan adanya dana desa ini karena pembangunan akan menjadi lebih lancar dengan adanya dana lebih tersebut, tidak hanya mengandalkan APBDes. Kalau zaman dulu, swadaya yang dijadikan stimulan kalau sekarang itu dananya penuh untuk infrastruktur.”

Selain dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Desa Sendang pun menyampaikan demikian. Terkait dengan kepuasan masyarakat akan adanya

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang, Ibu Sutanti. Pada tanggal 30 Januari 2017.

dana desa ini yang mampu meng-*cover* pembangunan yang ada di desa tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>37</sup>

“Mereka sangat responsif, jadi setelah ada dana desa, dimana yang notabennya masuk di rekening pemerintahan desa dan kepala desa sebagai pengawas pelaksana keuangan, mereka sudah aktif dalam proses sosialisasi. Jadi mereka semakin giat untuk dapat menerima informasi dari pemerintah desa. karena apa, karena dana desa ini benar adanya, betul ada rupiahnya, dalam pembuatan proposal, dalam proses pelaksanaan planning, mereka lebih giat dari sebelum adanya dana desa.”

Salah satu warga Desa Sendang pun memberikan pendapatnya terkait dengan dana desa tersebut, warga tersebut merupakan warga dari Pedukuhan Kembang yaitu Bapak Hariyanto, sebagai berikut:<sup>38</sup>

“Saya sangat senang juga dengan adanya dana desa ini, dulu kalau hujan sering longsor, sekarang ada dana desa jadi di dukuh-dukuh banyak yang di bangun talud. Semoga dana ini memang akan berkelanjutan.”

Terkait dengan adanya Undang-Undang Desa ini, selain pembangunan infrastruktur tercantum pula poin penting dalam undang-undang tersebut, yaitu pada pasal 86 tentang pengembangan sistem informasi desa. Perwujudan dari pengembangan sistem informasi desa ini adalah dengan adanya website desa. Menurut Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang, keberadaan website desa ini sangatlah penting. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Sutanti, sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Warga Desa Sendang, Bapak Hariyanto. Pada tanggal 30 Januari 2017.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang, Ibu Sutanti. Pada tanggal 30 Januari 2017.

“Sebenarnya website itu sangat penting, mau lihat dimana saja itu bisa, kita bisa menonjolkan potensi desa, tapi mau bagaimana lagi kalau sekarang memang harus mengikuti zamannya yang serba internet.”

Selain dukungan langsung dari aparaturnya sendiri seperti pernyataan Kepala Urusan Pemerintahan di atas, Kepala Desa Sendang juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan aduan masyarakat yang datang sendiri ke Kantor Desa untuk menanyakan apakah pelayanan publik di desa tersebut sudah dapat dilakukan secara *online*. Berikut ini adalah pernyataan dari Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>40</sup>

“Sudah banyak warga yang datang ke sini. Mereka meminta kepada pemdes untuk melakukan proses pelayanannya berbasis online/internet. Tapi karena masih banyak kendala, jadi untuk sementara masyarakat yang berada di luar kota yang akan mengurus surat-surat memang harus datang langsung ke kantor desa untuk mengurusnya. Ya harapan mereka memang pelayanannya sudah online sehingga memudahkannya untuk mengurus surat-surat. Sudah satu, dua, tiga warga yang mengharapkan seperti itu.”

Di Desa Sendang memang banyak remaja yang putus sekolah memilih merantau demi mendapatkan pekerjaan. Namun tidak hanya remaja saja, banyak pula usia produktif yang pergi keluar dari Desa Sendang untuk bekerja di Jakarta. Saat beberapa kali melakukan observasi di Desa Sendang, terdapat seorang warga bernama Yanto yang baru datang dari perantauan untuk mengurus perpindahan kependudukan. Setelah saling bertukar pendapat, Bapak Yanto menyayangkan mengapa Desa Sendang

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

pelayanannya belum bisa *online*. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Yanto, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

“Saya baru pulang dari Jakarta, sengaja pulang mau mengurus pindah penduduk kesana karena saya menetap disana dengan anak istri. Zaman sudah modern, tapi saya ngurus perpindahan belum bisa online jadi saya harus jauh-jauh kesini. Padahal kalau bisa online praktis sekali, saya bisa menghemat biaya untuk transportasi. Ya semoga saja dengan adanya dana desa, pelayanan Desa Sendang bisa online jadi teman-teman saya yang di Jakarta tidak perlu jauh-jauh kesini untuk ngurus surat-surat.”

Dari pernyataan warga tersebutlah, sebenarnya dari sisi masyarakat sudah mendukung penuh dengan adanya pelayanan publik yang berbasis elektronik. Selain mempersingkat waktu juga dapat menghemat biaya perjalanannya. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan kedepannya pengembangan sistem informasi desa ini akan menjadi hal yang serius dan pelayanannya dapat berbasis elektronik sehingga dapat memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi dan kemudahan dalam melakukan urusannya terkait dengan pelayanan publik.

Di lain sisi, di tingkat kecamatan dan kabupaten di Wonogiri memang sudah memiliki website. Dukungan dari masyarakat selain menginginkan adanya website di tingkat desa juga dapat berupa jumlah akses atau jumlah kunjungan terhadap website kecamatan dan kabupaten yang sudah dapat diakses beberapa tahun terakhir. Dilihat dari jumlah kunjungannya, website kabupaten memang lebih sering dikunjungi daripada website kecamatan. berikut print screen dari hasil kunjungan kedua website tersebut:

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Warga Desa Sendang, Bapak Yanto. Pada tanggal 19 Maret 2017.

**Gambar 5**  
**Print Screen Statistik Pengunjung**  
**Website Kabupaten Wonogiri**



**Gambar 6**  
**Print Screen Statistik Pengunjung**  
**Website Kecamatan Wonogiri**



Dapat dilihat dari statistik pengunjung pada website kabupaten dan kecamatan, memang angka total kunjungan sangat jauh berbeda karena memang website kabupaten sudah lama ada sedangkan website kecamatan baru ada tahun 2015.

### **3.4 Pembagian Potensi**

Elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan memang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Tidak hanya itu saja namun juga dalam mengimplementasikan para pelaksananya harus

memiliki strategi agar kebijakan tersebut nantinya dapat memecahkan persoalan dengan sebagaimana mestinya.

Dana desa yang turun pada pertengahan April 2016 pun dalam pelaksanaannya para Pemerintah Desa memiliki strategi-strategi tersendiri dalam menjalankannya. Salah satunya di Desa Sendang, saat dana desa ini turun langsung Pemerintah Desa Sendang mengadakan rapat di aula Kantor Desa Sendang yang dihadiri oleh tokoh masyarakat yang mana membahas apa saja yang diinginkan oleh masyarakat untuk dilakukan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya dengan cara ini saja, strategi lain yang digunakan dengan adanya kerjasama dengan KPMD dan BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga dapat benar-benar diketahui apa yang sebenarnya masyarakat desa butuhkan. Namun, pada kenyataan di lapangan, keberadaan BPD ini belum banyak berkontribusi terhadap pengadaan-pengadaan alat telekomunikasi di Desa Sendang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Urusan Pemerintahan yaitu Ibu Sutanti, sebagai berikut:<sup>42</sup>

“Sekarang di desa ada pendampingan namanya KPMD, dari KPMD dibantu oleh BPD itu menyerap aspirasi setiap dusun. Setiap ada pertemuan di dusun, pasti KPMD dan BPD menampung aspirasi masyarakat. Namun hingga saat ini keberadaan KPMD dan BPD belum sepenuhnya maksimal.”

Untuk perwujudan website ini memang sebagai sarana prasarana masyarakat dalam memudahkan mencari informasi terkait Desa Sendang. Namun untuk saat ini, terkait dengan strategi dalam melaksanakannya memang masih sedikit bingung pasalnya belum pernah ada sosialisasi terkait dengan strategi yang

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sendang, Ibu Sutanti. Pada tanggal 30 Januari 2017.

harus dipersiapkan dan dijalankan dari Pemerintah Daerah. Ini merupakan salah satu hal yang diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Sendang yaitu Bapak Budi Handono, sebagai berikut:<sup>43</sup>

“Ya kalau memang harus punya website nanti akan kita usahakan karena memang sudah tugas kami. Namun untuk strategi yang akan dilakukan bagaimana, kami masih belum tahu dan masih sedikit bingung ya. Karena apa, karena memang dari Bapak Bupati belum pernah membahas tentang ini. Kemaren itu baru membahas tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur saja.”

Seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Sendang diatas, memang penggunaan website di Kabupaten Wonogiri itu sendiri belum menyeluruh ke instansi-instansi yang lainnya. Melakukan sosialisasi memang relatif mudah karena akan terjun langsung kepada masyarakat sehingga strategi ini dianggap akan mampu lebih efektif dan efisien. Untuk saat ini Pemerintah Desa Sendang belum bisa memastikan strategi apa yang digunakan dan bagaimana melakukannya karena memang belum pernah ada sosialisasi terkait pembuatan website.

Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan agar pengembangan sistem informasi desa ini dapat dijalankan. Cara-cara dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang mampu untuk mengelola website. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto, sebagai berikut:<sup>44</sup>

“Sebenarnya saya pribadi ini mau informasi desa ini maju. Namun untuk sementara kami belum ada rencana untuk *menggandeng* pihak-pihak lain selain dari kecamatan dan kabupaten, karena memang dari bapak Bupati

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sendang, Bapak Budi Handono. Pada tanggal 13 Februari 2017.

<sup>44</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang, Bapak Agung Susanto. Pada tanggal 14 Agustus 2017.

belum menghendaki kalau desa mengalokasikan dananya untuk pengembangan sistem informasi desanya.”

Apabila bisa bekerjasama dengan pihak ketiga, maka aparaturnya Desa Sendang ini tidak perlu memiliki kelengkapan fasilitas seperti alat-alat telekomunikasi maupun *skill* terkait hal tersebut, namun memang harus mengalokasikan dana untuk jasa terhadap pihak ketiga tersebut. pihak ketiga ini dapat dicontohkan dengan para *travel blogger* media iklan di sosial media yang berdomisilikan dari daerah Kabupaten Wonogiri.

Adanya website ini nantinya tentu akan membawa manfaat yang sangat banyak bagi Desa Sendang mengingat desa ini merupakan desa wisata sehingga website ini dapat menjadi wadah promosi wisata dan juga produk-produk unggulan yang ada di Desa Sendang sehingga manfaat yang didapat untuk desa itu sendiri tidak hanya menambah pendapatan desa namun juga membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakatnya.